BAB II

AUDIT DAN LAPORAN KEUANGAN

A. Audit

1. Pengertian Audit

Audit menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008 disebutkan bahwa: "Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah".[28]

Sukrisno Agoes mendefinisikan *auditing* adalah: "Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut".[29]

Sedangakan menurut Rahayu dalam bukunya mengatakan bahwa *auditing* yaitu suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta

[28] Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, *Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)*, 2008. 5
[29] Sukrisno Agoes, *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaporkan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan, dimana *auditing* harus dilakukan oleh yang kompeten dan independen.[30]

Beberapa kata kunci penting dalam definisi *auditing* yang telah di paparkan di atas:[31]

a. Proses Sistematis

Merupakan serangkaian tahap dan prosedur yang logis, terstruktur dan terorganisir. Audit merupakan serangkaian tahap dan prosedur yang memerlukan suatu perencanaan yang baik, terstruktur dan terorganisir untuk mendapatkan tujuan dari pemeriksaan yang diharapkan.

b. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif

Bahan bukti (*evidence*) merupakan segala sesuatu yang mejadi informasi bagi auditor dalam menentukan apakah informasi yang diaudit disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atau tidak. Memperoleh dan mengevaluasi bahan bukti dalam audit merupakan aktivitas utama auditor dalam pelaksanaan audit. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif dimaksudkan sebagai suatu kegiatan memeriksa dasar asersi (bukti/*evidance*) dan menilai hasilnya secara tidak memihak. Bahan bukti pernyataan lisan dari klien, informasi dari pihak ketiga, dan hasil pengamatan auditor.

[30] Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, *Auditing: Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksa Akuntan Publik*. 1
[31] Ibid.,1-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Asersi (Informasi)

Informasi merupakan subyek audit. Pelaksanaan audit memerlukan informasi yang dapat diverifikasi dan juga memerlukan kriteria sebagai pedoman untuk mengevaluasi informasi tersebut (misal dalam audit atas laporan keuangan oleh kantor akuntan publik, kriteria yang digunakan adalah prinsip akuntansi yang berlaku secara umum untuk menentukan apakah laporan keuanga klien telah disusun secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum). Asersi atau informasi adalah pernyataan yang dibuat oleh individu atau entitas yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain.

d. Kriteria yang ditetapkan

Merupakan standar-standar yang digunakan untuk menguji asersi atau informasi, misalnya:

1. Peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan,
2. *Budgets*, standar-standar kinerja,
3. Prinsip akuntansi yang berlaku secara umum (SAK).

e. Kompeten dan independen

Kompeten artinya auditor harus mempunyai kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang dapat diambilnya. Sedangkan independen artinya auditor juga harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai sikap mental yang independen, yaitu sikap yang tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan harus tidak bias sehingga independensi merupakan tujuan merupakan tujuan yang harus selalu diupayakan.

Pengelompokkan pelaksanan pemeriksaan (auditor), menurut mulyadi[32] dikelompokkan menjadi:

1) Auditor Pemerintah

   Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau penanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Auditor pemerintah, di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

   a. Auditor eksternal pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badan yang tidak tunduk kepada pemerintah sehingga diharapkan dapat independen.
   b. Auditor internal pemerintah atau yang dikenal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggungjawab kepada presiden. Inspektorat jenderal

[32] Mulyadi. *Auditing Buku 2* (Jakarta: Salemba Empat. 2002). 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(itjen)/Inspektorat utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggungjawab kepada Menteri Kepala Lembaga Pemerintah non Departemen (LPDN). Inspektorat Pemerintah provinsi yang bertanggugjawab kepada gubernur, dan ispektorat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab kepada bupati/walikota.

2) Auditor Independen/Akuntan Publik

Auditor profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya.

3) Auditor Internal

Auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik tidaknya pengawasan terhadap kekayaan organisasi, menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam organisasi.

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes audit ditinjau dari pemeriksaan, dapat dibedakan atas:[33]

1. Manajemen Audit (*Operasional Audit*)
2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)

[33] Sukrisno Agoes, *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik.* 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*)
4. *Computer Audit*

2. Pengertian Audit Syariah

Audit syariah atau pemeriksaan syari'ah adalah pemeriksaan atas kesesuaian atau kepatuhan suatu lembaga keuangan dalam seluruh aktivitasnya dengan syari'ah islam. Pemeriksaan termasuk kontrak perjanjian, produk, transaksi memorandum dan akte perjanjian asosiasi, laporan keuangan, laporan lain khususnya laporan *internal auditor* dan bank sentral, surat interent dan lain-lain[34]

3. Pengertian Audit Internal

Sesuai dengan Surat Ketentuan Dir. Bank Indonesia No. 27/163/Kep./Dir tanggal 31 Maret 1995 untuk lebih memaksimalkan fungsi auditor intern. Disetiap bank telah dikeluarkan peraturan tentang kewajiban Bank Umum di Indonesia untuk menerapkan Standart Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank yang lebih dikenal dengan singkatan SPFAIB. Di dalam SPFAIB tersebut setiap bank umum wajib untuk:[35]

a. Menyusun *Internal Audit Chapter*
b. Menyusun Dewan Audit (*Audit Committe*)
c. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
d. Menyusun panduan audit intern

[34] Sofyan S Harahap, *Auditing Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Quantum, 2002). 18
[35] Teguh Pudjo Muljono, *Bank Auditing.* 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya *internal audit* didukung dengan adanya *agency theory*, Menurut *agency theory*, tindakan manajer dapat menyimpang dari kepentingan *shareholder*. Tindakan manajer ini dimotivasi oleh *pecuniary benefit* dan *non-pecuniary benefit*. Tindakan menyimpang dari manajer ini merupakan tindakan oppertunistik (*hyper rasional*) atau perilaku *discretion*. Argumen ini merupakan konflik sering terjadi antara *shareholder* dan manajer.[36] *Agency theory* dipelopori oleh Jensen dan Meckling (1976) dengan mendefinisikan ulang hubungan keagenan antara *shareholder* (*principal*) dan manajer (*agent*). Model mereka didasari pada *concentrated ownership*, pada kondisi ini maka manajer dapat berbeda kepentingannya dengan *shareholder*.[37]

Dengan adanya konflik kepentingan yang berbeda antara *shareholder* dan manajer dan tidak adanya prosedur pengawasan yang efektif maka ditakutkan manajer melakukan penyimpangan yang dapat merugikan *shareholder*.

Disinilah tugas audit internal yang dinilai independen yang dapat menelaah kebijakan akuntansi, pelaporan kinerja keuangan, pengendalian internal, prosedur, yang nantinya akan dikomunikasikan secara formal kepada dewan, manajemen, dan yang berkepentingan lainnya, sehingga dengan adanya komunikasi yang efektif dan efisien audit dapat berperan menyelesaikan konflik antara *principal* dan *agent* demi terciptanya tata kelolah perusahaan yang baik.

---

[36] DPE. Saerang, Parengkuan Tommy, dan Joubert B maramis, *Manajemen Keuangan: Pendekatan Teori Keagenan*, (Yogyakarta: Andy, 2011). 1
[37] Ibid., 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian audit internal yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian *internal audit* perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.[38]

4. Area Jelajah *Internal Audit*[39]

Esensi dari aktivitas manajerial yang baik adalah pengendalian yang memadai (untuk menjamin bahwa sistem kerja perusahaan berjalan baik). Sementara itu, substansi dari aktivitas bisnis yang sehat adalah merealisasikan peluang sebesar-besarnya dengan risiko sekecil-kecilnya (untuk menjamin bahwa strategi/target perusahaan tercapai secara optimal). Karena itu, lingkup kerja *Internal Audit* (*Audit View*, atau biasa disebut juga *Audit Universe* atau *Audit Scope*) dapat dikatakan seluas lingkup manajerial dan aktivitas bisnis perusahaan itu sendiri, dimana kemungkinan terjadinya *system break* dan timbulnya dampak dari *business risk* selalu terkandung dalam setiap aktivitas manajemen atau bisnis perusahaan.[40]

Dari pemaparan diatas bisa kita ketahui bahwa area jelajah audit internal merupakan ruang lingkup kerja audit internal yang harus di realisasikan sesuai atau seluas lingkup manajemen dan aktivitas perusahaan tersebut.

---

[38] Sukrisno Agoes, Sukrisno Agoes, *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. 13
[39] Valery G. Kumaat, *Internal Audit*. 37
[40] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pemahaman tersebut, lingkup *internal audit* dapat ditinjau dari 2 sisi prespektif yang saling melengkapi, yaitu:[41]

4. Perspektif Metodologi Kerja Audit yang terdiri dari 2 macam lingkup:
   1) *Critical-Process Audit View* : Audit Kepatuhan (*Compliance audit*).
   2) *Critical-Object Audit View* : Audit kepatutan (*Substantive Audit*).
5. Perspektif Aktivitas manajemen/bisnis yang terdiri dari 3 macam lingkup:
   1) *Conservative Audit View* : Audit Keuangan (*Financial Audit*)
   2) *Extended Audit View* : Audit Operasi (*Operational Audit*)
   3) *Advanced Audit View* : Audit Manajemen (*Management Audit*)

Sedangkan Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN), terdapat 3 (tiga) jenis Pemeriksaan, yakni:[42]

1. Pemeriksaan Keuangan

   Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan

[41] Ibid.
[42] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2007 tentang Standart Pemeriksa Keuangan Negara* (*SPKN*). 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengendalian intern. Pemeriksaan kinerja dilakukan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa. Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan pertanggungjawaban publik. Pemeriksaan kinerja dapat memiliki lingkup yang luas atau sempit dan menggunakan berbagai metodologi, berbagai tingkat analisis, penelitian atau evaluasi. Pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi.

Tujuan pemeriksaan yang menilai hasil dan efektivitas suatu program adalah mengukur sejauh mana suatu program mencapai tujuannya. Tujuan pemeriksaan yang menilai ekonomi dan efisiensi berkaitan dengan apakah suatu entitas telah menggunakan sumber dayanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara yang paling produktif di dalam mencapai tujuan program. Kedua tujuan pemeriksaan ini dapat berhubungan satu sama lain dan dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam suatu pemeriksaan kinerja. Contoh tujuan pemeriksaan atas hasil dan efektivitas program serta pemeriksaan atas ekonomi dan efisiensi adalah penilaian atas:

a. Sejauh mana tujuan peraturan perundang-undangan dan organisasi dapat dicapai.
b. Kemungkinan alternatif lain yang dapat meningkatkan kinerja program atau menghilangkan faktor-faktor yang menghambat efektivitas program.
c. Perbandingan antara biaya dan manfaat atau efektivitas biaya suatu program.
d. Sejauh mana suatu program mencapai hasil yang diharapkan atau menimbulkan dampak yang tidak diharapkan.
e. Sejauh mana program berduplikasi, bertumpang tindih, atau bertentangan dengan program lain yang sejenis.
f. Sejauhmana entitas yang diperiksa telah mengikuti ketentuan pengadaan yang sehat.
g. Validitas dan keandalan ukuran-ukuran hasil dan efektivitas program, atau ekonomi dan efisiensi.
h. Keandalan, validitas, dan relevansi informasi keuangan yang berkaitan dengan kinerja suatu program.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dapat bersifat: eksaminasi (*examination*), reviu (*review*), atau prosedur yang disepakati (*agreed-upon procedures*). Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern.

5. Sepuluh Standar *Auditing*

Standar *auditing* yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia terdiri atas 10 (sepuluh) standar yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yakni:[43]

a. Standar Umum

i. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor,

ii. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor,

iii. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

[43] Sukrisno Agoes, *Auditing Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Standar Pekerjaan Lapangan

i. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya,

ii. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan,

iii. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar Pelaporan

i. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,

ii. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode berikutnya,

iii. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor,

iv. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan denga laporan keuangan.

6. Tanggung Jawab dan Peranan Auditor Internal

Sawyer dalam bukunya[44] menyatakan tanggung jawab auditor internal adalah memberikan informasi yang diperlukan manajemen dalam menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Audit internal bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Auditor internal memiliki peranan yang penting dalam semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan risiko-risiko terkait menjalankan usaha.

Semua *internal auditor* melakukan pekerjaan yang sama yaitu sangat memperhatikan pemborosan dan kecurangan, dari manapun sumbernya dan sekecil apapun jumlahnya karena penyimpangan kecil bisa menjadi besar sehingga dapat menggoyahkan pilar-pilar perusahaan.

Pemeriksa intern memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa manajemen menjalankan operasional perusahan dengan baik dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan mendeteksi penipuan atau kecurangan dan

[44] Lawrence B. Sawyers, Mortimer A. Dittenhofer dan James H. Scheiner, *Sawyer's Internal Audit: Audit Internal Sawyer,* (Jakarta: Salemba Empat, 2006). 6-8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memelihara pengendalian intern. Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya.

Menurut Rahayu dalam bukunya mengatakan bahwa materi pokok yang merupakan tanggung jawab auditor adalah:[45]

1. Independensi auditor

   Independen artinya tidak mudah dipengaruhi, netral, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun. Auditor juga harus bersikap mempertahankan objektivitas agar tidak berbenturan dengan kepentingan lain.[46]

2. Keyakinan yang Memadai (*Reasonable Assurance*)

   Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material. Auditor merencanakan audit untuk mencapai keyakinan memadai guna mendeteksi salah saji yang diyakini jumlahnya cukup besar, secara individual atau keseluruhan, yang secara kuantitatif berdampak material terhadap laporan keuangan.[47]

---

[45] Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, *Auditing: Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksa Akuntan Publik*. 58
[46] Ibid.
[47] Ibid., 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pendeteksian *Errors* & *Fraud*[48]

Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan bebas dari salah saji material. Salah saji material dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan maupun kecurangan.

a) *Error* (Kekeliruan)

Istilah kekeliruan berarti salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak sengaja. Kekeliruan ini mencakup:

i. Kekeliruan dalam pengumpulan atau pengolahan data akuntansi yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan.

ii. Estimasi akuntansi yang tidak masuk akal yang timbul dari kecerobohan atau salah tafsir fakta.

iii. Kekeliruan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

b) *Fraud* (Kecurangan)

Pengertian *fraud* (dalam KUHP):

i. Mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

[48] Ibid., 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ii. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Atau supaya membuat utang atau piutang terhapus.

iii. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapus piutangnya.

iv. Merugikan pemeberi piutang dalam keadaan pailit.

Pada dasarnya terdapat 4 faktor pendukung seseorang untuk melakukan kecurangan yang disebut dengan Teori Gone yaitu:[49]

G : *Greed* (Keserakahan)

O : *Opportunity* (Kesempatan)

N : *Need* (Kebutuhan)

E : *Exposure* (Pengungkapan)

[49] Ibid., 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Proses Audit

a. *Audit Plan*

Standart pekerjaan lapangan pertama dalam buku karangan Sukrisno berbunyi sebagai berikut:[50]

"pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya".

Perencanaan dan supervisi berlangsung terus menerus selama audit, dan prosedur yang berkaitan sering kali tumpang tindih (*overlap*). Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh terhadap pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Sifat, luas, dan saat perencanaan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas satuan usaha. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan, antara lain:[51]

i. Masalah yang berkaitan dengan bisnis satuan usaha tersebut dan industri dimana satuan usaha tersebut beroprasi didalamnya.

ii. Kebijakan dan prosedur akuntansi satuan usaha tersebut.

iii. Metode yang digunakan oleh satuan usaha tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok-pokok perusahaan.

iv. Penetapkan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan.

---

[50] Sukrisno Agoes. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksa Akuntan oleh Akuntan Publik*. 142
[51] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

v. Pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit.

vi. Pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian (*adjusment*).

vii. Kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian audit, seperti risiko kekeliruan dan ketidakberesan yang material atau adanya transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

viii. Sifat laporan audit yang diharapkan akan diserahkan kepada pemeberi tugas (sebagai contoh, laporan audit tentang keuangan konsolidasi, laporan khusus untuk menggambarkan kepatuhan klien terhadap kontrak/perjanjian).

Auditor harus menyusun *audit plan*, isi dari *audit plan* mencakup:[52]

1. Hal-hal mengenai klien
   a. Bidang usaha klien, alamat, nomor telepon dan lain-lain.
   b. Status hukum perusahaan (berdasarkan Akta Pendirian).
   c. Accounting policy (kebijakan akuntansi).
   d. Neraca (laporan posisi keuangan) komparatif dan perbandingan penjualan, Laba/Rugi tahun lalu dan sekarang. Perbandingan

[52] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara neraca tahun lalu dan neraca tahun sekarang agar diperoleh gambaran mengenai besar kecilnya perusahaan.

e. *Client Contact*, yaitu nama orang-orang yang akan sering dihubungi auditor.

f. *Accounting, auditing dan Tax Problem*

2. Hal-hal yang mempengaruhi klien

   Bisa didapat dari majalah-majalah ekonomi/surat kabar, antara lain: Business News, ekonomi keuangan Indonesia.

   Contoh: adanya peraturan-peraturan baru yang dapat mempengaruhi klien.

3. Rencana kerja auditor

   Hal hal yang penting antara lain:

   a. Staffing

   b. Waktu pemeriksaan

      i. Waktu dimulainya suatu pemeriksaan

      ii. Berapa lama waktu pemeriksaan

      iii. *Deadline*, dalam artian laporan pemeriksaan

      iv. *Budget*, baik dalam jumlah kerja maupun biaya pemeriksaan.

   c. Jenis jasa yang diberikan

      i. *General Audit*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ii. *Special Audit*

iii. Bantuan Administrasi

iv. Menyusun Laporan Posisi Keuangan

v. Perpajakan

d. *Time Schedule*

b. *Audit Program*

Setelah *audit plan* disusun, dan sebelum pemeriksaan lapangan dimulai, auditor harus menyusun *audit program* yang merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalakan dan dibuat secara tertulis. *Audit program* membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. *Audit program* harus menggariskan dengan rinci, prosedur audit yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan audit. *Audit program* yang baik harus mencantumkan:

i. Tujuan pemeriksaan.

ii. Prosedur audit yang akan dijalankan.

iii. Kesimpulan pemeriksaan.

c. *Audit Prosedures* dan Audit Teknik

Audit Procedures adalah langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

efisien dan efektif. *Audit procedures* dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan-bahan bukti (*audit evidence*) yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan.

Untuk itu diperlukan audit teknik, yaitu cara-cara untuk memperoleh *audit evidance* seperti: konfirmasi, observasi, inspeksi, tanya jawab (*inquiry*) dan lain-lain.

Menurut Hiro Tugiman Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal sebagai berikut:[53]

1. Tahap perencanaan audit.
2. Tahap pengujian dan pengevaluasian informasi.
3. Tahap penyampaian hasil audit.
4. Tahap tindak lanjut (*follow up*) hasil audit.

Penjelasan dari tahapan-tahapan di atas adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Audit

   Tahap perencanaan audit merupakan langkah yang palinng awal dalam pelaksanaan kegiatan audit inten, perencaan dibuat bertujuan untuk menentukan objek yang akan diaudit/prioritas audit, arah dan pendekatan audit, perencanaan alokasi sumber daya dan waktu, dan merencanakan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan proses *auditing*.

[53] Hiro Tugiman, *Standart Profesional Audit Internal edisi Kelima* (Yogyakarta: Kanisius, 2006). 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Hiro Tugiman audit intern haruslah merencanakan setiap pemeriksaan. Perencanaan haruslah didokumentasikan dan harus meliputi:

a. penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan.
b. Memperoleh informasi dasar (*background information*) tentang kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa.
c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit.
d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu.
e. Melaksanakan survey untuk mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko dan pengawasan-pengawasan.
f. Penulisan program audit.
g. Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil audit akan disampaikan.
h. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit

2. Pengujian dan pengevaluasin informasi

Pada tahap ini audit intern haruslah mengumpulkan, menganalisa, menginterprestasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Menurut Hiro Tugiman proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dikumpulkannya berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pemeriksa dan lingkup kerja.
b. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk membuat suatu dasar yang logis bagi temuan audit dan rekomendasi-rekomendasi.
c. Adanya prosedur-prosedur audit, termasuk tehnik-tehnik pengujian.
d. Dilakukan penngawasan terhadap proses pengumpulan, penganalisaan, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi.
e. Dibuat kertas kerja pemeriksaan.

3. Penyampaian hasil pemeriksaan

Laporan audit intern ditujukan untuk kepentingan manajemen yang dirancang untuk memperkuat pengendalian audit intern, untuk menentukan ditaati tidaknya prosedur/kebijakan-kebijakan yanag telah ditetapkan oleh manajemen.

Audit intern harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat penyelewengan/penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam suatu fungsi perusahaan dan memberikan saran-saran/rekomendasi untuk perbaikannya.

Menurut Hiro Tugiman audit intern harus melaporkan hasil audit yang dilaksanakannya yaitu:[54]

[54] Ibid., 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Laporan tertulis yang ditanda tangani oleh ketua audit intern.
b. Pemeriksa intern harus terlebih dahulu mendiskusikan kesimpulan dan rekomendasi.
c. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat terstruktur dan tepat waktu.
d. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan.
e. Laporan mencantumkan berbagai rekomendasi.
f. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan.
g. Pimpinan audit intern merevieu dan menyetujui laporan audit.

4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan

Audit intern terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut (*follow up*) untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Audit intern harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior atau dewan telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Kode Etik Auditor

Menurut *The Institute of Internal Auditor* (IIA)[55] kode etik auditor internal adalah sebagai berikut:

Prinsip-prinsip:

Auditor internal diharapkan untuk menerapkan dan menegakkan prinsip - prinsip berikut:

1. Integritas

   Integritas auditor internal membentuk keyakinan dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan auditor internal.

2. Objektivitas

   Auditor Internal menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji. Auditor Internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

3. Kerahasiaan

   Auditor Internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.

[55] The Institute of Internal Auditor (IIA), *Code of Ethics*, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kompetensi

   Auditor Internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal.

Aturan Perilaku:

1. Integritas:

   1.1 Auditor internal harus melakukan pekerjaannya dengan jujur, sungguh-sungguh, dan bertanggung jawab.

   1.2 Auditor internal harus mematuhi hukum dan memberikan penjelasan sesuai dengan yang diharapkan oleh ketentuan hukum dan profesi.

   1.3 Auditor internal dilarang, secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal, atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal ataupun organisasi tempat bekerjanya.

   1.4 Auditor internal harus menghormati dan memberikan dukungan kepada tujuan organisasi yang sah dan etis.

2. Objektivitas

   2.1 Auditor internal tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, mengurangi kemampuannya untuk melakukan penilaian *(assessment)* secara objektif. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan organisasinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.2 Auditor internal dilarang menerima apapun, yang dapat atau patut diduga dapat, mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.

2.3 Auditor internal harus mengungkapkan semua fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan, dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direviu.

3. Kerahasiaan

3.1 Auditor internal harus bersikap hati-hati *(prudent)* dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperolehnya selama melaksanakan tugas.

3.2 Auditor internal dilarang menggunakan informasi, untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

4. Kompetensi

4.1 Auditor internal hanya akan memberikan jasa yang dapat dilaksanakan dengan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman penting yang dimilikinya.

4.2 Auditor internal harus memberikan layanan jasa audit internal sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal.

4.3 Auditor internal harus senantiasa meningkatkan keahlian dan efektivitas, serta kualitas jasa yang diberikannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Audit Untuk Perbankan

Beberapa audit tehnik pokok yang dapat digunakan untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut antara lain:[56]

1. *To Compare*/Memperbandingkan

   Yaitu tehnik pemeriksaan dengan meneliti dua hal secara bersamaan dan memperhatikan persamaan dan perbedaan antara dua hal tersebut. Dalam praktek tehnik ini dapat berbentuk aneka ragam antara lain:

   1) Membandingkan pos-pos biaya bank/pos-pos pendapatan bank pada satu tahun dengan tahun sebelumnya, dari perbandingan ini akan diperoleh kewajaran dari data tahun yang diperiksa.
   2) Membandingkan suatu pos biaya/pendapatan antara suatu periode berikutnya. Bagaimana perkembangannya? Apabila angka-angka pos/rekening tersebut menunjukkan yang konstan, jelas dapat disimpulkan terdapat transaksi-transaksi yang ditunda pembukuannya. Tetapi kalau menunjukkan semakin kecil tentu ada kejanggalan yang perlu diselidiki lebih lanjut.
   3) Membandingkan antara suatu dokumen pembayaran (voucher pembayaran) dengan kwitansi-kwitansi yang dilampirkan apakah terdapat kesamaan jumlah atau tidak.

[56] Teguh Pudjo Muljono, *Bank Auditing*. 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Vouching*

Yaitu memeriksa sahnya suatu transaksi dengan meneliti dokumen dasar yang dipakai untuk mencatat dan menyokong transaksi yang bersangkutan. Adapun maksud daripada *Vouching* sendiri antara lain:

1) Untuk mengetahui apakah dokumen yang digunakan tersebut sah dan asli.
2) Bahwa transaksi yang akan sedang diperiksa tersebut adalah untuk kepentingan bank yang bersangkutan, dan bukan untuk kepentingan peusahaan lain atau untuk pribadi pegawai/pejabat bank tersebut.
3) Bahwa transaksi tersebut adalah sesuai dengan sifat dan kegiatan bank yang bersangkutan.
4) Bahwa proses transaksi tersebut telah dilakukan sebagaimana mestinya, dan telah dilegalisir/ditanda tangani oleh pejabat-pejabat yang berhak, dan spesimen tanda tangan tersebut benar.
5) Bahwa angka-angka penjumlahan, perkalian, pengurangan, pemakain tanggal, nama-nama pihak, nomor-nomor rekening dan lain-lain yang tertera dalam dokumen tersebut telah benar.

3. *Reconciliation*

Yaitu mencari atau menentukan perbedaan-perbedaan yang terdapat antara dua hal, dan mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan tersebut. Di dalam kegiatan perbankan, teknik rekonsiliasi ini dugunakan untuk meneliti perbedaan-perbedaan yang ada antara saldo-saldo rekening

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

koran yang diterima bank maupun rekening-rekening koran yang dipelihara oleh bank yang bersangkutan.

4. Konfirmasi

Yaitu mencari bukti kebenaran dari pihak lain. Konfimasi ini dalam prakteknya ada 2 bentuk yaitu:

a. Bentuk positif

Dimana nasabah (debitur, deposan) dan lain-lain diminta menjawab apakah dia setuju dengan informasi yang diberikan.

b. Bentuk negatif

Dimana nasabah diminta untuk menjawab jika dia tidak setuju dengan informasi yang diberikan.

Namun dalam berbagai kondisi dan situasi kedua bentuk konfirmasi tersebut dapat dikombinasikan.

B. Laporan Keuangan

1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk menkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan perusahaan dibagi dua, yaitu pihak intenal seperti manajemen perusahaan dan karyawan, dan pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan merupakan alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahan dan kinerja perusahaan.[57]

Laporan keuangan berkaitan erat dengan bidang akuntansi. Kegiatan akuntansi pada dasarnya merupakan kegiatan mencatat, menganalisa, menyajikan, dan menafsirkan data keuangan dari lembaga perusahaan dan lembaga lainnya dimana aktivitasnya berhubungan dengn produksi dan pertukaran barang-barang atau jasa-jasa. Bagi lembaga yang bertujuan memperoleh keuntungan, akuntansi memberikan metode untuk menentukan apakah lembaga tersebut memperoleh keuntungan atau sebaliknya menderita kerugian sebagai hasil dari transaksi yang dilakukanya. Oleh karena itu akuntansi (laporan keuangan) dapat dipakai sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Dan karena fungsi inilah akuntansi sering disebut sebagai "language of business".[58]

George A. MacFarland, Robert D. Ayars dan Williard E. Stone dalam bukunya Soedijono menjelaskan bahwa definisi akuntansi yaitu:[59]

> *seni mencatat, menyajikan dan menafsirkan secara sistematik transaksi-transaksi keuangan sebuah perusahaan.*

Dari definisi diatas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya dapat dibedakan tiga fungsi pokok akuntansi, yaitu:[60]

---

[57] Hery, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012). 3
[58] Djarwanto Ps, *Pokok-pokok Analisa Laporan Keuangan* (Yogyakarta: BPFE, 1997). 1
[59] Soedijono Reksoprajitno, *Analisis Laporan Keuangan: Analisi Rasio* (Jakarta: Gunadarma, 1993). 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Fungsi pencatatan atau fungsi *recording*, yaitu mencatat secara sistematik semua transaksi keuangan perusahaan.
2. Fungsi penyajian atau fungsi *presentation*, yaitu mengikhtisarkan secara sistematik data akuntansi dalam bentuk laporan-laporan keuangan dan atau bentuk-bentuk lainnya, disajikan untuk mereka yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan.
3. Fungsi penafsiran atau fungsi *interpretation*, yaitu membuat analisa terhadap data akuntansi baik yang diikhtisarkan dalam bentuk laporan keuangan ataupun dalam bentuk-bentuk lainnya.

Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Sedangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dijelaskan tentang tujuan laporan keuangan yang isinya: "tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi".

2. Analisa Laporan Keuangan Komparatif

Analisa laporan komparatif dilakukan dengan cara menelaah neraca, laporan laba rugi, atau laporan arus kas secara berurutan dari suatu periode ke periode berikutnya. Analisis ini meliputi penelaahan atas perubahan saldo

[60] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiap-tiap akun dari tahun yang satu ke tahun berikutnya, atau selama beberapa tahun. Melalui analisis laporan keuangan komparatif, kita akan dapat memperoleh informasi mengenai kecenderungan atau tren saldo akun dari tahun ke tahun atau selama beberapa tahun. Melalui analisis komparatif kita juga dapat menilai mengenai kelogisan hubungan antara saldo akun yang satu dengan saldo akun yang lainnya yang saling berkaitan.[61]

Amin Widjaja dalam bukunya menjelaskan bahwa laporan keuangan komparatif memuat beberapa laporan keuangan yang disejajarkan. Maksudnya ialah untuk saling membandingkan pos-pos dalam laporan keuangan yang satu dengan pos-pos yang sama dalam laporan keuangan yang lain, agar dengan demikian dapat ditarik simpulan tertentu. Misalnya apakah pos-pos tertentu dalam satu laporan kurang wajar atau sebaliknya.[62]

Terdapat dua teknik analisis komparatif, yaitu analisis perubahan dari tahun ke tahun dan analisis kecenderungan angka indeks:[63]

1. Analisis Perubahan Dari Tahun ke Tahun

   Untuk analisis perubahan dari tahun ke tahun,biasanya perbandingan laporan keuangan dilakukan dalam periode yang relatif pendek (2 atau 3 tahun) untuk tiap-tiap akun. Analisis perubahan dari tahun ke tahun dapat dinyatakan dalam angka mutlak maupun persentase. Sebagai contoh, jika besarnya saldo kas pada akhir periode pertama dan

[61] Hery, *Analisis Laporan Keuangan*. 27
[62] Amin Widjaja Tunggal, *Dasar-dasar Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1995). 79
[63] Hery, *Analisis Laporan Keuangan*. 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua berturut-turut adalah Rp. 20 juta dan Rp. 25 juta, maka besarnya perubahan saldo kas adalah Rp. 5 juta atau 25%.

2. Analisis Kecenderungan Angka Indeks

Analisis kecenderungan angka indeks berguna untuk perbandingan tren jangka panjang. Analisis ini memerlukan pemilihan tahun dasar untuk seluruh akun, yang biasanya diberi angka indeks 100. Karena tahun dasar akan menjadi rujukan untuk semua perbandingan, maka yang menjadi tahun dasar sebaiknya adalah tahun dimana kondisi bisnis normal terjadi.

Ketika menggunakan angka indeks, presentase perubahan dihitung dengan mengacu pada tahun dasar. Sebagai contoh, jika besarnya kas pada akhir periode pertama (sebagai tahun dasar) dan akhir periode kedua berturut-turut adalah Rp. 20 juta dan Rp. 25 juta, maka besarnya angka indeks kas untuk periode kedua tersebut adalah 125, didapat dari Rp. 25 juta : Rp. 20 juta x 100. Berikutnya, jika saldo akhir pada periode ketiga tersebut adalah Rp. 10 juta, maka besarnya angka indeks kas untuk periode ketiga tersbut adalah 50, didapat dari Rp. 10 juta : Rp. 20 juta x 100. Perubahan saldo kas antara periode pertama dan periode kedua untuk ilustrasi ini adalah 25%, yaitu 125% – 100%. Namun, perubahan antara periode kedua dan ketiga adalah bukan minus 75%, yaitu 50% – 125%, melainkan minus 60% yang diperoleh dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angka indeks (50 – 125) : 125 atau (Rp. 10 juta – Rp. 25 juta) : Rp. 25 juta.

3. Analisis Rasio dan Kinerja

Terdapat berbagai jenis teknik analisis termasuk berbagai rasio keuangan yang dapat dipergunakan untuk melakukan penilaian kinerja sebuah perusahaan. Akan tetapi, perlu disadari bahwa teknik yang berbeda akan sesuai untuk tujuan yang berbeda. Analis harus mendefisikan secara jelas unsur-unsur berikut ini:[64]

- Sudut pandang yang diambil
- Tujuan analisis
- Standar perbandingan yang potensial.

Namun, manfaat yang sebenarnya dari setiap rasio sangat ditentukan oleh tujuan spesifik analisis. Labih lanjut rasio-rasio itu bukan merupakan kriteria yang mutlak. Rasio-rasio yang bermanfaat dapat menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau kinerja operasi, dan membantu menggambarkan kecenderungan serta pola perubahan tersebut, yang pada gilirannya, dapat menunjukkan kepada analis risiko dan peluang bagi perusahaan yang sedang ditelaah.[65]

[64] Erich A. Helfert, *Teknik Analisis Keuangan: Petunjuk Praktis Untuk Mengelola dan Mengukur Kinerja Perusahaan Edisi 8* (Jakarta: Erlangga, 1996). 67
[65] Ibid.,68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat banyak individu dan kelompok yang berbeda yang berkepentingan atas keberhasilan dan kegagalan suatu perusahaan tertentu, beberapa kelompok paling utama adalah:

- Pemilik (investor)
- Manajer
- Pemberi pinjaman dan kreditor
- Karyawan
- Organisasi pekerja
- Agen pemerintah
- Masyarakat umum (publik)

Pandangan kelompok-kelompok ini terhadap hasil dan kinerja perusahaan sangatlah berbeda. Mereka sering kali menggunakan data selain data keuangan ekonomi. Manajer bertanggung jawab atas efisiensi operasi, profitabilitas jangka pendek dan panjang, serta penggunakan yang efektif atas modal, upaya manusia, dan sumberdaya lainnya.[66]

Selanjutnya adalah pemilik perusahaan, khususnya yang berkepentingan dengan profitabilitas jangka pendek dan jangka panjang dari investasi modal yang mereka tanamkan. Mereka biasanya mengharapkan laba dan deviden yang meningkat yang akan membawa pertumbuhan pada nilai ekonomi.[67]

Berikutnya adalah kelompok penyedia, yaitu pemberi pinjaman dan kreditor yang memberikan dana bagi perusahaan untuk berbagai jangka wktu

[66] Ibid.,68-69
[67] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbeda. Mereka berkepentingan dengan kemampuan membayar bunga yang jatuh tempo, kemampuan perusahaan untuk membayar kembali pokok pinjaman, dan ketersediaan nilai aktiva residual tertentu yang memberikan marjin perlindungan terhadap resiko.[68]

4. Rasio Keuangan Bank Syariah di Indonesia

Hingga saat ini analisis rasio keuangan bank syariah masih menggunakan aturan yang berlaku di bank konvensional. Jenis analisi rasio keuangan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:[69]

1. Perbandingan Internal, yaitu analisis dengan membandingkan rasio sekarang dengan yang lalu dan yang akan datang untuk perusahaan yang sama.
2. Perbandingan Eksternal, yaitu analisis dilakukan dengan membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis dengan rata-rata industri pada suatu titik yang sama.

Adapun jenis rasio keuangan bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Rentabilitas (*earning*)
   a. *Return on Asset* (ROA)[70]

      adalah rasio yang mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan

[68] Ibid.
[69] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. 252
[70] Bank Indonesia, *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank* (Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral, 2012). 184

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

$$Return\ on\ Asset = \frac{Laba\ sebelum\ pajak}{Rata - rata\ total\ Aktiva}$$

Kriteria penilaian peringkat:

i. Peringkat 1 ROA > 1,5%

ii. Peringkat 2 1,25 % < ROA ≤ 1,5%

iii. Peringkat 3 0,5 % < ROA ≤ 1,25%

iv. Peringkat 4 0% < ROA ≤ 0,5%

v. Peringkat 5 ROA ≤ 0%

b. *Return on Equity* (ROE)[71]

Merupakan rasio untuk Mengukur kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba. Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin besar.[72]

$$ROE = \frac{Laba\ bersih\ setelah\ pajak}{Rata - rata\ modal\ disetor}$$

c. Rasio Efisiensi Operasional (REO)[73]

[71] Ibid., 190
[72] Ibid., 190
[73] Ibid., 185

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi kegiatan operasional bank syariah.

$$REO = \frac{BO}{PO}$$

Kriteria penilaian peringkat:

a. Peringkat 1 REO ≤ 83%
b. Peringkat 2 83% < REO ≤ 85%
c. Peringkat 3 85% < REO ≤ 87%
d. Peringkat 4 87% < REO ≤ 89%
e. Peringkat 5 REO > 89%

2. Likuiditas

Adalah ukuran kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya,[74] meliputi:

a. *Short Term Mismatch* (STM)[75]

Mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek.

$$STM = \frac{Aktiva\ jangka\ pendek}{Kewajiban\ jangka\ pendek}$$

[74] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. 253
[75] Bank Indonesia, *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank*. 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Aktiva jangka pendek adalah aktiva likuid kurang dari 3 bulan selain kas, SWBI dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam laporan maturity profile sebagaimana dimaksud dalam Laporan Berkala Bank Umum Syariah.

ii. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban likuid kurang dari 3 bulan dalam laporan maturity profile sebagaimana dimaksud dalam Laporan Berkala Bank Umum Syariah.

Kriteria penilaian peringkat:

6. Peringkat 1 STM > 25%
7. Peringkat 2 20% < STM ≤ 25%
8. Peringkat 3 15% < STM ≤ 20%
9. Peringkat 4 10% < STM ≤ 15%
10. Peringkat 5 STM ≤ 10%

b. *Short Term Mismatch Plus* (STMP)[76]

Kemampuan bank syariah dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek dengan menggunakan aset jangka pendek, kas dan *secondary reserve*

$$STMP = \frac{Aktiva\ jangka\ pendek + kas + second\ reserve}{Kewajiban\ jangka\ pendek}$$

[76] Ibid., 199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Aktiva jangka pendek adalah aktiva likuid kurang dari 3 bulan selain kas, SWBI dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam laporan maturity profile sebagaimana dimaksud dalam Laporan Berkala Bank Umum Syariah.

ii. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban likuid kurang dari 3 bulan dalam laporan maturity profile sebagaimana dimaksud dalam Laporan Berkala Bank Umum Syariah.

iii. Kas adalah uang tunai.

iv. *Secondary reserve* adalah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) ditambah dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Kriteria penilaian peringkat:

a. Peringkat 1 STMP ≥ 50%

b. Peringkat 2 40% ≤ STMP < 50%

c. Peringkat 3 30% ≤ STMP < 40%

d. Peringkat 4 20% ≤ STMP < 30%

e. Peringkat 5 STMP < 20%

c. *Finance Deposit Ratio* (FDR)[77]

Adalah menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pinjaman. Rumus FDR adalah:

$$Finance\ Deposit\ Ratio = \frac{Total\ Pembiayaan}{Total\ DPK}$$

[77] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. 253

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rasio Aktivitas

Adalah ukuran untuk menilai tingkat efisiensi bank dalam memanfaatkan sumber dana yang dimilikinya. Rasio ini meliputi:

a. *Fixed Asset Turnover* (FAT) adalah kemampuan aktivitas (efisiensi) dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva tetap bank dalam suatu periode tertentu dengan jumlah keseluruhan aktiva.

$$Fixed\ Asset\ Turnover = \frac{Aktiva\ tetap}{Total\ aktiva}$$

b. *Total Asset Turnover*, adalah rasio yang menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar dalam satu periode tertentu atau kemampuan bank dalam mengelolah sumber dana dalam menghasilka pendapatan (*revenue*). Rasio ini dihitung dengan menggunakan rumus:

$$Total\ Asset\ Turnover = \frac{Pendapatan\ Operasional}{Total\ Aktiva}$$

4. Kualitas Aset (*Asset Quality*)

a. NPF (*Non Performing Finance*)[78]

Adalah menunjukkan ukuran tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas Pembiayaan bank syariah semakin buruk.

[78] Ibid., 179

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasio ini bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$NPF = \frac{Pembiyaan\ (KL, D, M)}{Total\ pembiyaan}$$

Kriteria penilaian peringkat:

a. Peringkat 1 NPF < 2%

b. Peringkat 2 2% ≤ NPF < 5%

c. Peringkat 3 5% ≤ NPF < 8%

d. Peringkat 4 8% ≤ NPF < 12%

e. Peringkat 5 NPF ≥ 12%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id